

Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19

Aeroen Safis Kharisman¹, Muhammad Eko Atmojo²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: aeroen.safis.2014@fisipol.umy.ac.id¹, muhammadekoatmojo05@gmail.com²

Dikirim : 15 Agustus 2021 | Direvisi : 31 Agustus 2021 | Diterima : 29 November 2021

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat dampak pandemic terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bantul. Mengingat pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi ancaman bagi semua negara termasuk Indonesia. DIY menjadi salah satu daerah yang menerima dampak dari adanya pandemi Covid-19 terutama pada sektor perekonomian, mengingat DIY merupakan objek pariwisata sekaligus sebagai kota pelajar. Penurunan jumlah UMKM ini disebabkan permintaan pasar akan barang jasa akibat pandemi Covid-19. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pendapatan serta jumlah omset pada pemilik usaha. Pemerintah daerah yang menjalankan dan mengatur pemerintahan di daerah memegang peran yang juga penting dalam menangani dan mengurangi dampak akibat pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas KUKMP Kabupaten Bantul cukup responsif dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, terutama pada aspek sikap dan pembuatan kebijakan yang mengacu pada permasalahan serta keluhan UMKM di Kabupaten Bantul. Namun ada satu aspek yang harus ditingkatkan yaitu terkait penempatan dan keikutsertaan UMKM pada sistem pelayanan dalam hal ini kebijakan dan kegiatan atau program yang dijalankan.

Kata Kunci: Responsivitas, UMKM, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

This study aims to see the impact of the pandemic on MSMEs in Bantul Regency. Considering the Covid-19 pandemic has spread throughout the world and is a threat to all countries including Indonesia. DIY is one of the areas that has received the impact of the Covid-19 pandemic, especially in the economic sector, considering that DIY is a tourism object as well as a student city. The decline in the number of MSMEs was due to market demand for goods and services due to the Covid-19 pandemic. This will certainly affect the income and turnover of the business owner. The regional government that runs and regulates regional government plays an important role in handling and reducing the impact of the Covid-19 pandemic. The research was conducted using qualitative research methods, with data obtained from interviews and documentation. The results show that the Bantul Regency KUKMP Office is quite responsive in handling MSMEs affected by the Covid-19 pandemic, especially in terms of attitude and policy making that refers to the problems and complaints of MSMEs in Bantul Regency. However, there is one aspect that must be improved, namely the placement and participation of MSMEs in the service system, in this case the policies and activities or programs that are carried out.

Keywords: Responsiveness, UMKM, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi ancaman bagi semua negara termasuk Indonesia (Ginanjar, 2020). Meski kesembuhan pasien Covid-19 terus mengalami peningkatan, dan sudah dijalankannya program vaksinasi dari pemerintah, namun ketidakpastian perekonomian menjadi dampak yang masih terus dirasakan, tidak hanya dunia tapi juga Indonesia. Menurut Laporan Kementerian Keuangan, dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19 membuat *Internasional Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus 3% (kemenkeu.go.id, 2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%, Namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi Corona, dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2% (Hadiwardoyo, 2020). Koreksi ekonomi di Indonesia ini dipengaruhi oleh menurunnya berbagai komponen ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (BPS, 2021). Berbagai sektor khususnya dalam dunia usaha menghadapi masalah keuangan yang beraneka ragam dengan tingkat kerugian tertentu. Laporan Badan Pusat Statistik pada September 2020 mengungkapkan bahwa seluruh sektor bisnis mengalami penurunan pendapatan, dimana untuk Usaha Menengah Besar (UMB) sekitar 82,29% dan untuk sektor Usaha Menengah Kecil (UMK) sebesar 84,20%. Kondisi ini tentu saja menyulitkan beberapa UMKM yang terdampak Covid-19, karena tidak ada permintaan baik produk atau jasa, yang akhirnya tidak dapat membiayai operasionalnya, bahkan yang memiliki kredit pada Bank tidak dapat membayar kreditnya (Prasetyo et al., 2020).

Penurunan pendapatan pada UMKM akibat pandemi Covid-19 dikarenakan adanya dampak berantai. Menurut (Rosita, 2020) dampak berantai terjadi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta kampanye *stay at home*, sehingga terjadi penurunan pada permintaan, gangguan rantai pasok, pembatalan pesanan, kekurangan bahan baku, gangguan transportasi, dan lainnya. Sedikitnya 39,9% UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), serta 16,1% UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup (BPS, 2020). Himbauan dari Pemerintah mengenai *social distancing* yang dicanangkan mulai tanggal 15 Maret 2020 juga diprediksi memberi dampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kepada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian bangsa (Masruroh et al., 2021). Penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat membantu

menangani permasalahan Covid-19 dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah (Milzam et al., 2020). Merujuk pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdapat kewajiban daerah, jika dikaitkan dengan penanganan Covid-19 yaitu pada pasal 12 yang mengatur urusan wajib pemerintah daerah seperti kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pangan, serta pemberdayaan masyarakat. Beberapa kewajiban itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menangani dan membantu pemulihan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah yang merasakan dampak pandemi Covid-19 terutama pada sektor ekonomi. Sebagai kota pariwisata dan pelajar, pandemi Covid-19 membuat berkurangnya wisatawan yang berkunjung akibat adanya aturan PSBB, para pelajar dan mahasiswa juga memilih untuk pulang ke kampung halaman karena aktivitas pendidikan yang dihentikan sementara. Kondisi tersebut mengakibatkan UMKM di DIY mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan bahkan menyebabkan kebangkrutan. Menurut data tahun 2019, UMKM yang ada di DIY mencapai 250 ribu, dimana 26% atau sekitar 62 ribu tersebar di Kabupaten Bantul.

UMKM di Bantul banyak bergerak pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Sektor-sektor tersebut merasakan dampak yang cukup besar karena berkurangnya permintaan dari konsumen. Berdasarkan pernyataan dari (Joewono, 2020) dalam (Suharsono, 2020) bahwa selama pandemic ada sekitar 72,6% UMKM yang mengalami penurunan omzet, kinerja dan permodalan. Dampak yang terjadi karena pandemi Covid-19 harus mendapat respon yang cepat dan tepat, mengingat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu, sangat diperlukan responsivitas dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul sebagai instansi yang menangani UMKM. Responsivitas yang dimaksud yaitu bagaimana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul memberikan tanggapan secara cepat dan nyata untuk menangani dampak ekonomi yang dialami UMKM karena pandemi Covid-19. Sedangkan menurut (Joewono, 2020) dalam (Suharsono, 2020) perlu adanya transformasi SDM dan transformasi digital bagi pelaku UMKM. Berdasarkan latar belakang di tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19”.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masing-masing memberikan paparan

mengenai pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi, khususnya UMKM. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mufida et al., 2020) yang membahas mengenai Strategi Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19 dari Perspektif Ekonomi. Penelitian lain membahas secara khusus terkait dampak ekonomi pada UMKM di Indonesia, seperti penelitian oleh (Thaha, 2020) dan (Rwigema, 2020) yang membahas Dampak dan Pengaruh Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia, penelitian oleh (Pratiwi, 2020) dan (Bahtiar & Saragih, 2020) tentang Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM, serta penelitian yang dilakukan oleh (Ondang et al., 2020) tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa.

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya terletak pada fokus penelitian, dimana sama-sama membahas mengenai peran pemerintah dalam menangani UMKM yang terdampak Covid-19, mengingat pandemi yang terjadi tidak hanya mempengaruhi bidang kesehatan, tetapi merambat kepada perekonomian yang mengakibatkan pelaku UMKM mengalami penurunan permintaan, penjualan dan profit. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terdahulu banyak membahas dampak dan pengaruh pandemi Covid-19 pada tingkat nasional, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada pemerintah daerah, hal ini dikarenakan sistem pemerintahan desentralisasi membuat setiap daerah memiliki sumber daya berbeda dan kasus yang berbeda-beda. Hal ini tentu menarik untuk melihat peranan pemerintah daerah dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga indikator utama dari Rasyid (1998), yaitu:

1. Sikap Aparat Dinas Koperasi dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19
2. Penggunaan Aspirasi UMKM di Kabupaten Bantul sebagai Referensi Membuat Kebijakan
3. Penempatan UMKM dalam Sistem Pelayanan yang Berlaku

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagai dasar metode penelitiannya. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur pada penelitian yang memberikan data dalam bentuk deskriptif, atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017). Data-data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber diantaranya Kepala

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Staf Bidang UKM, dan UMKM di Kabupaten Bantul. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban dari pertanyaan (Sugiyono, 2016). Sedangkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk gambar, foto, sketsa, dokumen terkait dan lain-lain (Yusuf, 2014). Dokumentasi yang digunakan berupa foto dan laporan-laporan yang mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responsivitas adalah kemampuan suatu birokrasi atau organisasi untuk lebih memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian nantinya disusun sebagai agenda kegiatan dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai prioritas utama dalam melaksanakan program atau kegiatan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat (Sedarmayanti, 2004). Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Tangkilisan, 2005). Responsivitas juga menjadi salah satu dimensi untuk menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Responsivitas dalam konteks penelitian ini yaitu berkaitan dengan daya tanggap dan tangkap Dinas Koperasi, UMK, dan Perindustrian (KUKMP) Kabupaten Bantul dalam memahami dan menanggapi keinginan serta kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian dan penanganan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Berikut ini penjelasan terkait respon Dinas KUKMP dalam menangani UMKM yang terdampak Covid-19:

Sikap Aparat Dinas Koperasi dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19

Responsivitas salah satunya dapat diukur menggunakan sikap, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan (Hardiyansyah, 2011) bahwa sikap dan komunikasi merupakan indikator dari responsivitas. Sikap menjadi titik sentra dimana hal ini terkait dengan peran pemerintah Kabupaten Bantul untuk menangani permasalahan dan membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oleh Karen itu, terkait dengan bagaimana sikap Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, telah dilakukan wawancara dengan Kepala Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Drs. Agus Sulistiyo, MM, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB), yaitu sebagai berikut:

“Kalau terkait responsivitas, kami tentu pertama harus melakukan pendataan terlebih dahulu, melihat kebutuhan UMKM, Koperasi dan industri yang tentu selanjutnya kita lihat perintah dari pemda, pemprov, atau pusat seperti apa, kita sebagai regulator membantu bupati dan membantu mengkoordinasikan kebijakan, jadi Covid-19 ini cakupannya luas, sehingga suatu kebijakan yang diambil tidak hanya program dari kita saja, melainkan dari pemprov, pusat, bupati.”

Hasil wawancara menjelaskan bahwa respon yang dilakukan oleh Dinas KUKMP ketika terjadi pandemi Covid-19 yaitu yang pertama melakukan pendataan. Pendataan dilakukan untuk melihat seberapa banyak dampak yang ditimbulkan, berapa jumlah UMKM yang juga terdampak, dan dampak apa saja yang ditimbulkan. Proses pendataan ini juga sebagai upaya Dinas KUKMP Kabupaten Bantul untuk melihat aspirasi dan tuntutan UMKM, yang selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan baik bagi Dinas KUKMP atau untuk diteruskan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, mengingat permasalahan tentang dampak Covid-19 menjadi pertimbangan banyak pihak. Tetapi, Dinas KUKMP sebagai yang terkait erat dengan UMKM adalah garda terdepan yang melakukan pendataan. Data terbaru yang dikeluarkan menunjukkan status UMKM yang ada di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 1. Data Status UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2021

No.	Jenis UMKM	Jumlah
1.	Usaha Mikro	46.626
2.	Usaha Kecil	1.428
3.	Usaha Menengah	60
4.	Status Kosong	1.784
Total UMKM yang Terdaftar		49.898

Sumber: Data Seksi UMK Dinas KUKMP Kab. Bantul 2021

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdapat 1.784 UMKM yang masuk kategori status kosong. Ini menunjukkan bahwa terdapat UMKM yang pada masa pandemi Covid-19 berhenti beroperasi dan bahkan gulung tikar akibat tidak mendapat pemasukan serta menurunnya penjualan. Data-data dan aspirasi seperti inilah yang kemudian digunakan oleh Dinas KUMKP dan OPD terkait, untuk membuat kebijakan dan mencari solusi terbaik bagi penanganan dampak ekonomi pada UMKM karena pandemi Covid-19.

Selain itu, sikap pemerintah daerah dalam merespon situasi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 haruslah berlandaskan norma hukum. Dengan kata lain, meskipun pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur daerah mereka sendiri, tetapi penyelenggaraan pemerintah di level daerah tetap harus bersandar pada regulasi yang

dibentuk pusat. Upaya penanganan penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul juga merujuk pada payung regulasi yang digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti beberapa peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- d. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2002 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan pandemi Covid-19
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Hal ini sesuai keterangan yang disampaikan oleh Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) yang mengatakan bahwa:

“Respon di tingkat dinas itu yang kami lakukan adalah pendataan, kami juga ada program pelatihan untuk UMKM yang tujuannya untuk pengembangan kewirausahaan, ini fokusnya lebih ke yang mikro, tapi ada juga yang fokus ke usaha kecil dan menengah. Responsivitas di tingkat Dinas yang berkaitan langsung dengan UMKM yang terdampak itu memang ikut aturan dari atasnya lagi mas, ada Perpres, Pergub, dan lain-lain. Kita sendiri tidak dapat menjalankan apa pun yang ada di luar program kita, nanti kita menyalahi aturan, tapi memang untuk isinya kita bisa sesuaikan, seperti pelatihan untuk usaha mikro, kita buat pelatihan supaya dapat jualan online.”

Hasil wawancara mempertegas pula pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, dimana pendataan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui aspirasi, tuntutan, kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Disebutkan pula bahwa respon yang dilakukan harus tetap memenuhi aturan dan rencana program yang sudah ditetapkan, dengan program dan kegiatan yang disesuaikan untuk membantu UMKM keluar dari situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu membuat pelatihan bisnis *online* untuk UMKM, sehingga mereka dapat tetap menjalankan usaha mereka dengan memanfaatkan media baru, sekaligus tetap menjalankan himbauan pemerintah untuk menerapkan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus.

Dinas KUKMP dapat mengidentifikasi dengan baik persoalan yang ada, meski tidak dapat ditangani secara langsung setiap permasalahannya, karena dampak yang terjadi

memiliki cakupan yang cukup luas. Meski demikian, peran dari Dinas KUKMP ini memberikan kontribusi yang baik bagi UMKM yang ada di Kabupaten Bantul, dimana peran Dinas KUKMP sebagai regulator dan pihak yang terkait secara langsung dengan UMKM yang ada di Bantul sudah tepat.

Penggunaan Aspirasi UMKM di Kabupaten Bantul sebagai Referensi Membuat Kebijakan

Indikator selanjutnya mengenai responsivitas yaitu penggunaan keluhan (dalam hal ini aspirasi) sebagai referensi dalam membuat program atau kebijakan. Pembuatan program atau kegiatan merupakan salah satu bentuk respons dari organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut (Dwiyanto, 2008) terdapat 2 strategi yang dapat digunakan, yaitu menerapkan strategi KYC (*Know Your Customers*) dan menerapkan Model *Citizen Charter*. Prinsip KYC digunakan oleh birokrasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat sebelum memutuskan jenis pelayanan apa yang akan diberikan. Untuk mengetahui keinginan, kebutuhan dan kepentingan pengguna, pelanggan atau masyarakat, birokrasi pelayanan harus mendekati diri dengan masyarakat, salah satunya dengan melakukan pendataan status UMKM yang ada di Kabupaten Bantul. Selain menggunakan data yang diperoleh pada pendataan awal, Dinas KUKMP Kabupaten Bantul juga mengumpulkan aspirasi dan informasi dari masyarakat menggunakan beberapa metode, seperti survei, wawancara dan observasi secara langsung. Seperti yang disampaikan oleh Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) mengatakan bahwa:

“kami sudah siapkan survei, tentu surveinya juga terbatas kalau sedang pandemi seperti ini, istilahnya kita kasih link nanti UMKM dapat mengisinya. Linknya itu ada di website resmi pemkab Bantul. Survei itu penting, kita untuk buat program atau kebijakan apalagi yang urgent kaya gini, perlu mas survei.”

Berdasarkan wawancara menjelaskan bahwa proses identifikasi untuk membuat program atau kebijakan dilakukan melalui serangkaian cara, yang salah satunya menggunakan survei. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas KUKMP mengadakan survei yang tertera pada <https://diskukmp.bantulkab.go.id/>. Survei ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi UMKM yang ada setelah terjadinya pandemi Covid-19. Survei ini dilakukan kepada UMKM yang sudah terdaftar dan masuk dalam sistem SiBakul Jogja. Sistem informasi membuat informasi UMKM yang ada di Bantul dapat terintegrasi dan mudah melakukan pembinaan dan tata kelola. Berikut merupakan gambaran mengenai situs

website yang digunakan sebagai survei secara *online* kepada UMKM yang sudah terdaftar:

Gambar 1. Halaman Website Untuk Melakukan Survei UMKM



Sumber: diskukmp.bantulkab.go.id

Selain melalui survei, dilakukan pula diskusi atau wawancara dengan UMKM. Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) mengatakan bahwa:

“kami mengadakan program pelatihan yang mengundang beberapa UMKM yang ada di Bantul, jumlahnya banyak sekitar 150an UMKM, di situ selain ada program pelatihan kami juga sering menampung aspirasi dari UMKM mas, konsepnya itu karna pandemi online. Pelatihan itu masuk program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, di situ ada beberapa pelatihan, UMKM banyak diundang dan di situ ada wawancara dan diskusi juga terkait kendala pada saat pandemi ini.”

Hasil wawancara menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat sebagai pelaku UMKM diperoleh ketika acara pelatihan. Pelatihan merupakan program rutin yang dilakukan Dinas KUKMP Kabupaten Bantul untuk mengembangkan UMKM, sekaligus untuk menjangkau aspirasi masyarakat sehingga dapat mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan, khususnya di masa pandemi Covid-19. Beberapa aspirasi dan keluhan yang dihasilkan dari survey, wawancara dan observasi yang dilakukan yaitu:

- Kurangnya pengalaman dan pengetahuan untuk menjalankan usaha secara *online*
- Tidak bisa melunasi pinjaman bank penurunan omset
- Kesulitan keuangan dan membutuhkan dana untuk operasional
- Kesulitan memasarkan produk

Setelah terkumpul informasi, aspirasi, dan keluhan dari UMKM, langkah selanjutnya yaitu merancang program atau kegiatan yang tepat agar dapat membantu mengatasi permasalahan UMKM sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas KUKMP Kabupaten Bantul. Rancangan program yang dilakukan tentu harus berdasar pada kebutuhan dan keinginan

masyarakat. Menurut (Dwiyanto, 2008) konsep *Citizen Charter* adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Dalam hal ini, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan (masyarakat) harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan layanan. *Citizen charter* juga mendorong penyedia dan pengguna layanan serta *stakeholders* lainnya secara bersama-sama menyepakati jenis, prosedur, waktu, serta biaya pelayanan. Kesepakatan ini harus mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna layanan. Pada kasus UMKM di Kabupaten Bantul, Dinas KUKMP membuat program atau kebijakan dengan menyesuaikan aspirasi dan keluhan UMKM, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Keluhan dan Upaya Penanganan Permasalahan UMKM Akibat Covid-19

No.	Aspirasi dan Keluhan	Program atau Kebijakan
1.	UMKM mayoritas terhenti karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan sehingga tidak dapat mengembangkan bisnisnya	Pelatihan, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dalam inovasi bisnis - Pelatihan bisnis <i>online</i> - Pelatihan pemasaran secara digital
2.	UMKM kesulitan untuk membayar pinjaman setelah terjadi pandemi	Restrukturisasi pinjaman
3.	Kesulitan keuangan karena operasi bisnis berkurang atau bahkan terhenti dan membutuhkan modal	Bantuan dana dan akses modal
4.	Kesulitan memasarkan produk	Bantuan Pemasaran/Promosi

Sumber: Data Seksi UMK Dinas KUKMP Kab. Bantul 2021

Kesesuaian antara aspirasi dan keluhan UMKM dengan respon dalam bentuk program atau kebijakan yang diberikan oleh Dinas KUKMP dapat dikatakan tepat. Peneliti menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas KUKMP merupakan rancangan yang didasarkan atas aspirasi UMKM. Upaya ini tentu saja tidak secara menyeluruh dapat membantu semua UMKM yang ada di Kabupaten Bantul, tetapi pemerintah daerah melalui Dinas KUKMP berupaya memberikan penanganan untuk beberapa UMKM sesuai dengan kemampuan dari dinas dan melihat dari potensi serta dampak kerugian apabila tidak ditangani.

Penempatan UMKM dalam Sistem Pelayanan yang Berlaku

Indikator selanjutnya terkait dengan responsivitas adalah penempatan UMKM dalam sistem pelayanan yang berlaku. Maksud dari indikator ini adalah mengukur sejauh mana UMKM ditempatkan dalam sistem pelayanan di Dinas KUKMP sehingga dapat terkendali. Terkendali yaitu agar terdeteksi perkembangan atau penurunannya sehingga nantinya sebagai

dasar dalam pembuatan program atau kebijakan. Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUMKP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) mengatakan bahwa:

“penempatan UMKM dalam sistem pelayanan tentu kami usahakan, jadi setiap ada program kami mengupayakan keterlibatan UMKM untuk mencari aspirasinya. Adanya pandemi Covid-19 ini juga menjadi hal yang baik buat kami karena kita semakin mengetahui kondisi di lapangan, adanya pendataan membuat kita tahu kondisi sesungguhnya seperti apa.”

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas KUMKP Kabupaten Bantul selalu mengupayakan agar UMKM ikutserta dalam setiap kegiatan atau program. Dinas KUMKP juga selalu berupaya untuk menempatkan UMKM dalam pertimbangan mengambil kebijakan, mengingat UMKM menjadi salah satu unit usaha yang merasakan dampak negatif dari adanya pandemi Covid-19. Upaya ini diharapkan dapat membuat setiap program dan kebijakan yang telah dibentuk memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi UMKM di Bantul terutama yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa UMKM di Kabupaten Bantul, yaitu:

“hubungan kita dengan dinas jarang ada kaitannya, cuma ketika ada program seperti kemarin pameran dan bantuan dana, baru kami ikut program tersebut.” Pengusaha minuman kekinian (Fitriani, 8 April 2021, Pukul 10:00 WIB)

“sama sekali belum pernah ikut program yang berkaitan dengan dinas, kami hanya ke dinas kalau harus mengurus surat-menyurat seperti perijinan.” UMKM yang bergerak di bidang fashion (Puji Rahayu, 9 April 2021, Pukul 18:00 WIB)

“kami pernah mengurus beberapa program untuk bantuan langsung tunai ke dinas, tapi itu juga lewat online. Usaha kami juga belum lama jadi gak begitu tahu harus apa yang dilakukan untuk mengurus kedepannya, mungkin kalau skalanya lebih besar nanti kami membutuhkan perizinan itu baru kami mengurus.” UMKM yang bergerak di bidang penjualan aksesoris (Chrismawati, 11 April 2021, Pukul 14:00 WIB)

“oh iya tentu saya pernah, saya ikut beberapa pelatihan yang memang rutin diadakan oleh dinas, saya juga pernah ikut pertemuan dengan dinas pariwisata, dan terakhir ikut menerima bantuan 2,4 juta dari dinas.” UMKM yang memproduksi makanan kering (Neni Nurlikah, 11 April 2021, Pukul 17:00 WIB)

“terkait dengan dinas, Kami pernah mengajukan program, kemudian harus memenuhi beberapa syarat, setekah itu harus menunggu dan alhamdulillah program itu di ACC.” Pemilik usaha kedai kopi (Zainal Arifi, 17 April 2021, Pukul 16:00 WIB)

Dari beberapa hasil wawancara dengan UMKM diatas, dapat disimpulkan bahwa belum semua UMKM ditempatkan dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan atau program yang diadakan oleh Dinas KUMKP Kabupaten Bantul, karena keterbatasan Dinas KUMKP untuk

menjangkau semua UMKM di Kabupaten Bantul. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan dan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas KUKMP untuk melibatkan UMKM secara aktif dan menyeluruh dalam merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program atau kegiatan, terutama pada kondisi pandemi Covid-19, agar program dan kegiatan yang dibentuk tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta mampu mengurangi permasalahan UMKM yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bantul.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data diatas terkait dengan responsivitas Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid 19 dapat dikatakan cukup responsif, karena dari tiga aspek yang menjadi penilaian, dua diantaranya sudah dijalankan dengan baik dan kebijakan, program serta kegiatan yang dijalankan sesuai dengan permasalahan yang dialami UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Aspek-aspek tersebut diantaranya:

1. Sikap Dinas KUMKP dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19

Sikap Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam merespon situasi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 yang pertama yaitu melakukan pendataan untuk melihat jumlah UMKM yang terdampak, apa saja dampak yang dirasakan, berapa kerugian yang ditimbulkan dan lain sebagainya, data-data ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan atau program penanganan atau akan diserahkan kepada pemkab/pemprov mengingat permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggungjawan satu instansi saja. Sikap yang diambil Dinas KUKMP juga didasarkan pada norma hukum, dimana dalam membuat dan mengambil keputusan tetap mengacu pada peraturan dan keputusan dari pemerintah pusat dan daerah (pembup dan pemprov).

2. Penggunaan aspirasi UMKM sebagai referensi membuat kebijakan

Penggunaan aspirasi UMKM dalam membuat kebijakan dapat dikatakan berhasil, dimana setelah diperoleh data awal melalui pendataan, Dinas KUKMP juga mengumpulkan informasi dan keluhan masyarakat menggunakan beberapa cara seperti survei, wawancara dan observasi. Informasi dan keluhan tersebut kemudian digunakan sebagai landasan untuk membuat kebijakan atau program penanganan dampak Covid-29 bagi UMKM. Sebagai contoh, UMKM mengeluhkan kurangnya pengalaman dan pengetahuan untuk menjalankan usaha secara *online*, kemudian Dinas KUKMP mengambil kebijakan dengan mengadakan pelatihan bisnis secara *online*, selain itu dibantu untuk restrukturisasi pinjaman karena banyak UMKM yang kesulitan membayar pinjaman akibat menurunnya

omset, memberikan bantuan dana dan akses modal agar usaha UMKM dapat tetap dijalankan, selain itu, dinas juga memberikan bantuan untuk melakukan promosi produk secara lebih luas.

3. Penempatan UMKM dalam sistem pelayanan yang berlaku

Informasi, aspirasi dan keluhan dari UMKM menjadi aspek yang diperhatikan dan ditempatkan menjadi dasar dalam membuat dan mengambil keputusan/kebijakan terkait penanganan UMKM yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bantul. Meskipun demikian, UMKM di Kabupaten Bantul belum secara aktif dan menyeluruh dilibatkan dalam program dan kebijakan yang dibuat, mengingankan kurangnya cakupan untuk menjangkau UMKM di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Info Singkat*, 7(6), 19–24.
- BPS, (Badan Pusat Statistik). (2021).
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ginancar, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 52–68.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 10.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM di Indonesia. *Journal of Innovation and Knowledge*, 1(1).
- Milzam, M., Mahardika, A., & Amalia, R. (2020). Corona Virus Pandemic Impact on Sales Revenue of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekalongan City, Indonesia. *Journal of Vocational Studies on Applied Research*, 2(1), 7–10.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (36th ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid dari Perspektif Ekonomi. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2), 112–130.
- Prasetyo, E. T., Yuliana, Muniroh, L., Halin, H., & Winarso, W. (2020). The Activities of SMEs and The Role Indonesian Government During Covid-19 Pandemic. *Solid State Technology*, 63(2), 4010–4027.
- Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. *Jurnal Ners*, 4(2), 30–39.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109–120.
- Rwigema, P. C. (2020). Effect of Covid-19 on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Rwanda. *The Strategic Journal of Business & Change Management*,

7(4), 1630–1655.

- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23rd ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, A. (2020). Strategi UMKM Bantul Merespon Pandemi (Studi Kasus Bidang Kriya/Kerajinan). *Jurnal Riset Daerah, XX(3)*.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand, 2(1)*, 147–153.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2020). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3)*, 1–10.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (1st ed)*. Jakarta: Kencana.